



JALAN MENUJU KELAHIRAN KESULTANAN PALEMBANG (1675)

Aulia Novemy Dhita¹, Salsabila Nofradatu¹
Pendidikan Sejarah, FKIP-Universitas Sriwijaya¹
Email: aulianovemydhita@unsri.ac.id

Abstract

The Palembang Sultanate was born as a result of the less harmonious relationship between Palembang and Mataram. This explains that in the course of its history, Palembang had a relationship with the kingdom in Java. This study aims to describe the relationship of Palembang with Java before the birth of the Palembang Sultanate (1675). This research uses historical methods in the form of heuristics, source criticism, interpretation and historiography. The results showed that the Palembang Kingdom was the forerunner to the birth of the Palembang Sultanate. After the collapse of Sriwijaya, Palembang became a royal protection area in Java, namely Majapahit, Demak, Pajang and Mataram. In 1675, Ki Mas Hindi officially adopted the title sultan. This action politically demonstrated that Ki Mas Hindi was equivalent to that of the Mataram ruler and marked the birth of the Palembang Sultanate.

Keywords: Kingdom, Sultanate, Palembang

Abstrak

Kesultanan Palembang lahir sebagai akibat dari hubungan yang kurang harmonis antara Palembang dan Mataram. Hal ini menerangkan bahwa dalam perjalanan sejarahnya Palembang memiliki hubungan dengan kerajaan di Jawa. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan hubungan Palembang dengan Jawa sebelum lahirnya Kesultanan Palembang (1675). Penelitian ini menggunakan metode historis berupa heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kerajaan Palembang merupakan cikal bakal kelahiran Kesultanan Palembang. Pasca keruntuhan Sriwijaya, Palembang menjadi wilayah protektorat kerajaan di Jawa yaitu Majapahit, Demak, Pajang dan Mataram. Pada tahun 1675, Ki Mas Hindi secara resmi menggunakan gelar sultan. Tindakan ini secara politik menunjukkan bahwa status Ki Mas Hindi setara dengan penguasa Mataram dan menandai kelahiran Kesultanan Palembang.

Kata kunci: Kerajaan, Kesultanan, Palembang

PENDAHULUAN

Palembang merupakan salah satu wilayah di Provinsi Sumatera Selatan yang dikenal dengan sungai Batang Hari Sembilan, salah satunya yaitu Sungai Musi. Sungai ini membelah kota ini menjadi uliran dan uluan. Secara geografis, kondisi alam Palembang didominasi



oleh air. Pengertian ini merujuk pada toponim Palembang yaitu yang menunjukkan tempat dan lembang yang berarti tanah yang rendah, tanah yang tertekan, akar yang lunak karena lama terendam air (Hanafiah, 2005). Namun kondisi ini hanya bertahan sampai ketika Pemerintah Kolonial Belanda ‘membangun daratan’ di Palembang sejak tahun 1821. Perubahan-perubahan ini mengalami puncaknya pada awal abad ke-20, ketika Palembang dijadikan suatu kota berdasarkan undang-undang desentralisasi (desentralisatiewet) yang diberlakukan pada 1 April 1906, meskipun pembangunan Palembang secara berkesinambungan baru terlaksana pada 1929 (Santun dalam Farida, Rochmiatun, & Kalsum, 2019).

Modernisasi dengan penimbunan-penimbunan sungai-sungai yang ada di dalamnya secara lambat tapi pasti telah mengubah citra perkotaan Palembang. Persepsi penduduk lokal pun tentang ruang kota bergeser mengenai dari “ruang perairan” ke “ruang daratan”. Menurut analisis Irwanto, penduduk mulai memaknai “ruang daratan” yang tercermin dari jalan-jalan yang diciptakan oleh pemerintah kolonial sebagai sarana transportasi yang jauh lebih mudah dan cepat jika dibandingkan dengan “ruang perairan” sebelumnya. Namun, pembangunan jalan dan jembatan yang menimbun sungai tersebut membawa implikasi bagi masyarakat lokal yang melakukan proses adaptasi terhadap pola daratan yang diciptakan oleh pemerintah kolonial (Farida et al., 2019).

Beberapa sungai yang ‘disulap’ menjadi daratan di antaranya sungai di sekitar keraton-keraton Kesultanan Palembang yaitu Sungai Kapuran (sekarang Jl. Kapuran), Sungai Tengkuruk yang kemudian dikenal Jl. Tengkuruk (saat ini Jl. Jend. Sudirman). Lalu Sungai Penedan merupakan terusan yang menghubungkan Sungai



Kemenduran, Sungai Kapuran dan Sungai Duku. Ketiga sungai ini bertemu kira-kira di persimpangan Jl. Rustam Efendi dan Jl. Jend. Sudirman. Keadaan Sungai Penedan sejajar dengan Jl. Rustam Effendi memotong Jl. Syangan (Hanafiah, 2005). Namun demikian, wajah kota yang dulunya identik dengan air ini, tetap memiliki ikon air yang istimewa, yaitu Sungai Musi. Bukan hanya itu, berdasarkan catatan sejarah, wilayah ini memiliki kejayaan masa lampau di bawah pemerintahan Kerajaan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim terbesar dan salah satu kerajaan tertua di Indonesia (Suswandari, Absor, Aprilia, Nurahman, & Noviansyah, 2021; Suswandari, Absor, Tamimah, Nugroho, & Rahman, 2021). Lalu lintas perdagangan dilakukan dalam skala internasional. Selain itu, menjalin hubungan harmonis dengan India di bidang keagamaan. Walau bercorak Buddha, kerajaan ini menanamkan sikap toleransi kepada penganut agama lainnya.

Kerajaan Sriwijaya mengisi 'buku harian' perjalanan sejarah Kota Palembang. Pasca keruntuhan Kerajaan Sriwijaya, Palembang berada di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit dan kerajaan lain di Jawa, yaitu Demak, Pajang, dan Mataram (Rahiem, 1998). Riwayat berdirinya Kesultanan Palembang tidak terlepas dari keadaan politik yang terjadi di kerajaan-kerajaan tersebut. Hingga akhirnya Pangeran Ratu Ki Mas Hindi memproklamasikan lahirnya Kesultanan Palembang dengan menggunakan gelar sultan pada namanya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis yang meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Tahapan heuristik dilakukan dengan mencari sumber berkaitan dengan sejarah pra Kesultanan Palembang dan pada saat berlangsungnya pemerintahan tersebut. Beberapa sumber yang



digunakan dalam penelitian ini di antaranya karya Djohan Hanafiah dan Husni Rahim. Tahapan kedua, yaitu kritik sumber. Pada tahapan ini, berbagai sumber tertulis yang diperoleh, baik berupa artikel atau buku, perlu dikaji mengenai penulis, tema, dan tahun terbit. Beberapa sumber yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu karya Djohan Hanafiah yang banyak melahirkan tulisan mengenai Kesultanan Palembang. Tema yang sama ditulis pula oleh Nawiyanto & E.C. Endrayadi dan lainnya.

Selanjutnya sampai pada tahap interpretasi dan historiografi. Kegiatan yang dilakukan pada tahap interpretasi, yaitu menafsirkan data-data dari sumber yang diperoleh. Tahap ini bisa jadi menghasilkan sudut pandang baru karena dalam perjalanannya, dapat ditemukan sumber-sumber baru dengan persepsi yang berbeda. Adapun tahap terakhir, yaitu historiografi yang penulisan peristiwa sejarah berdasarkan unsur sebab-akibat, sistematis, dan bersifat kronologis (Irwanto & Alian, 2014).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Palembang Pasca Keruntuhan Sriwijaya

Sriwijaya merupakan kerajaan bercorak Buddha terbesar di Indonesia. Kerajaan ini juga memiliki predikat sebagai kerajaan maritim. Keberadaannya bermula dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Prof. Kern dan George Coedes. Kedua tokoh ini memegang peran penting dalam perkembangan penelitian mengenai Sriwijaya pada masa-masa selanjutnya. Salah satu poin yang masih menjadi perdebatan adalah mengenai letak ibu kota Sriwijaya. Klaim tersebut berdasarkan bukti-bukti penemuan arkeologis. Namun demikian, Palembang merupakan wilayah yang banyak ditemukan bukti arkeologis berupa prasasti keberadaan Sriwijaya. Prasasti-prasasti



tersebut adalah Kedukan Bukit (682), Talang Tuo (684), Telaga Batu, prasasti kedua di daerah Telaga Batu, dua prasasti di Sabo Kingking, dan prasasti Boom Baru. Selain itu, di Bukit Siguntang ditemukan pula beberapa fragmen yang memuat tentang adanya peperangan, dan kutukan kepada siapa saja yang melakukan kesalahan. Prasasti-prasasti di atas memuat tentang perjalanan suci Dapunta Hyang dan mendirikan wanua, kutukan-kutukan pada siapa saja yang tidak mau tunduk pada raja Sriwijaya, pendirian Taman Criksetra, dan beberapa taman lain untuk penduduk Sriwijaya, juga memuat nama-nama pejabat di Sriwijaya, mulai dari yang tertinggi hingga terendah (Poesponegoro & Notosusanto, 1975).

Sriwijaya tumbuh sebagai kerajaan yang memiliki wilayah kekuasaan di seluruh Sumatera, pulau Jawa bagian Barat, Semenanjung Malaya, dan Selat Malaka. Sebagai jalur yang sangat strategis, Selat Malaka berperan menjadikan Sriwijaya sebagai pusat perdagangan, bahkan dengan wilayah luar Indonesia. Selat ini menghubungkan para pedagang dari berbagai wilayah, seperti Cina, India, dan Arab (Wolters, 1970). Kejayaan gilang gemilang Sriwijaya mulai meredup terutama pada abad ke-14 M ketika Kerajaan Majapahit menguasai Sriwijaya. Namun, sebenarnya pada pertengahan abad ke-11 M, Sriwijaya mulai lemah akibat serangan Kerajaan Cola. Selain itu, banyak wilayah kekuasaan Sriwijaya yang mulai melepaskan diri dan melemahnya kekuatan militer terutama berkaitan dengan Selat Malaka.

Pasca keruntuhan Sriwijaya, Palembang tetap eksis sebagai kota niaga yang di dalamnya masih terdapat suatu tumpuan kegiatan ekonomi dan perdagangan yang masih dikenal sebagai Ku-kang (dalam bahasa Cina) atau Pelabuhan Lama. Kota Palembang menjadi tumpuan pelabuhan internasional yang secara khusus banyak disinggahi pedagang-pedagang dari Cina. Bahkan, kota ini pernah menjadi *enclave*



(daerah kantong) Cina selama kurang lebih 200 tahun. Ketika kota Palembang berada dalam kontrol ekonomi para pedagang Cina, Pangeran Palembang, Parameswara, terpaksa meninggalkan kota ini pada tahun 1397. Hal ini menunjukkan sudah ada hubungan dagang, meskipun hubungan tersebut tidak dalam bentuk kerja sama yang adil (Muhibat dan Mulyana dalam Syawaludin & SIRAJUDIN FIKRI, 2019).

Palembang menjadi daerah kekuasaan kerajaan di Jawa (Majapahit, Demak, Pajang, dan Mataram). Pergolakan politik di kerajaan tersebut juga mempengaruhi kehidupan di Palembang. Seperti ketika tahun 1519 M, Pati Unus dari Demak menaklukkan Majapahit (Haryono, 1997). Setelah runtuhnya Kerajaan Majapahit, Palembang menjadi daerah protektorat (perlindungan) Kerajaan Demak yang dipimpin oleh Raden Patah. Raden Patah adalah anak Prabu Brawijaya dari Majapahit dari seorang wanita Cina muslim, yang ketika sedang hamil diserahkan kepada Adipati Palembang Ario Damar. Setelah anak itu lahir, ia dibesarkan di Palembang dan dididik secara Islam bersama Raden Kusen (anak kandung Ario Damar) (Rochmiatun, 2017). Saat menjadi raja Demak, Raden Patah bergelar "Senopati Jimbung Ngabdurrahman Panembahan Palembang Sayidin Panatagama" yang artinya: "Panglima Jimbung Hamba yang Maha Kasih dan di Agungkan di Palembang yang menjadi pimpinan dan pengatur agama" (Poesponegoro & Notosusanto, 1975).

Raden Patah membawa Demak pada kejayaan, namun sepeninggalnya kerajaan ini melemah. Terlebih ketika mendapat serangan dari Pajang. Pada peristiwa ini, sebanyak 24 keturunan Pangeran Trenggono, pindah dari Demak ke Palembang yang dipimpin oleh Ki Gede Sedo Ing Lautan, sedangkan anaknya, Ki Gede Ing Suro Tuo ke Palembang melalui Surabaya. Setibanya di Palembang,



mendirikan Kerajaan Palembang dan mendirikan istana yang disebut Kuta Gawang sekarang Kompleks Pabrik Pupuk Sriwijaya (Jl. Mayor Zen) (Abdullah, 1982).

Mengenai Ki Gede Ing Suro ini dijelaskan bahwa keluarga Sultan Trenggono meninggalkan Demak menuju Palembang yang dianggap sebagai tempat leluhur mereka (Hanafiah, 1998). Keluarga ini dipimpin oleh Ki Gede Ing Suro Tuo yang kemudian kembali lagi ke Demak untuk menjemput saudara-saudara yang lain. Sepeninggal Ki Gede Ing Suro Tuo, Palembang di bawah kendali Ki Gede Ing Suro Mudo. Dalam perjalanan kembali ke Palembang, Ki Gede Ing Suro Tuo wafat karena kapal yang ditumpanginya tenggelam di laut. Sebab itulah, ia juga dikenal dengan sebutan Pangeran Sido Ing Lautan. Atas kejadian tersebut, Palembang dipimpin oleh Ki Gede Ing Suro Mudo. Terdapat perbedaan interpretasi antara dua sumber di atas. Namun, dalam dalam penulisan ini diyakini bahwa Ki Gede Ing Suro Tuo adalah orang yang sama dengan Pangeran Sido Ing Lautan.

Menurut kajian Graff dan Pigeaud (dalam Syawaluddin, 2014), Ki Gede Ing Suro Tuo dianggap sebagai raja pertama dan berkuasa sejak tahun 1547 sampai 1552. Ki Gede Ing Suro Tuo merupakan salah satu pelarian dari Jipang yang kemudian memegang pemerintahan di Palembang pada tahun 1541. Ki Gede Ing Sura Muda memerintah Palembang sejak tahun 1572 – 1589 atau selama 17 tahun. Ki Gede Ing Sura Muda inilah kemungkinan yang membangun kompleks pemakaman Gede Ing Suro. Tokoh ini juga dikenal dengan sebutan Ki Gede Ing Suro Ilir atau Kyai Mas Anom Adipati Ing Suro.

Sebagai wilayah yang berada di bawah perlindungan kerajaan-kerajaan di Jawa, Palembang melakukan kewajibannya untuk datang menghadap raja (*seba*) sebagai bukti loyalitas, dengan mengantarkan upeti kepada raja dan memberikan bantuan yang diperlukan dalam



peperangan (Amin, 1986:77-78). Namun, terjadi penolakan upeti oleh raja Mataram. Hal inilah yang menentukan kisah Kerajaan Palembang pada masa-masa selanjutnya.

Kelahiran Kesultanan Palembang

Kegiatan *seba* yang dilakukan Palembang terhadap Majapahit tidak mendapat 'perhatian' yang baik. Hal ini menimbulkan kekecewaan Palembang. Penolakan ini telah terjadi sejak masa pemerintahan Pangeran Sido Ing Rajek, ketika mengirim utusan ke Mataram dan ditolak oleh Amangkurat I. Sikap ini masih terus berlanjut bahkan hingga Pangeran Sido Ing Rajek mengangkat Pangeran Ratu Ki Mas Hindi sebagai pemimpin Kerajaan Palembang.

Perlakuan dan sikap sultan Mataram menyebabkan Ki Mas Hindi mengambil sikap tegas terhadap Kerajaan Mataram, yaitu dengan menggunakan gelar sultan. Ki Mas Hindi yang memiliki nama lengkap Pangeran Ario Kusumo Abdurrahim Kemas Hindi bin Pangeran Sido Ing Pesarian bin Pangeran Manca Negara Cirebon bin Pangeran Adipati Sumedang bin Pangeran Wira Kesuma Cirebon bin Sunan Giri, bergelar Sultan Abdurrahman Kholifatul Mukminin Sayidul Imam. Secara politis tindakan ini bermaksud menyejajarkan status Kerajaan Mataram dengan Kesultanan Palembang. Dari peristiwa tersebut, Kesultanan Palembang lahir seiring penggunaan gelar sultan oleh Ki Mas Hindi pada tahun 1675.

Dalam melaksanakan pemerintahannya, ia dikenal arif dan bijaksana. Ia memimpin Kesultanan Palembang selama 45 tahun. Wafat pada tahun 1706 dan dimakamkan di Candi Walang (24 Ilir Palembang). Setelah wafat, ia dikenal dengan sebutan Sunan Candi Walang (Syarifuddin & Zainuddin, 2013).



Sebagai sultan pertama Kesultanan Palembang ia telah mendirikan keraton baru di Beringinjanggut dan kompleks pemakaman Cinde Walang. Pengangkatan ini disertai dengan penandatanganan kontrak perjanjian antara Palembang dan Belanda pada tahun 1662. Salah satu isi perjanjian tersebut adalah Belanda diizinkan kembali untuk mendirikan loji dan gudang di tempat yang strategis dan dekat sungai. Loji tersebut dikenal dengan Loji Sungai Aur dan letaknya berhadapan dengan Keraton Beringinjanggut (Syawaluddin, 2014).

Dalam bidang pemerintahan, ia menerapkan sistem perwakilan di daerah pedalaman atau dikenal dengan istilah *raban* dan *jenang*. Undang-undang dan peraturan-peraturan yang dibuatnya dituangkan dalam bentuk *piagem* (piagam), yang harus dilaksanakan oleh setiap daerah yang masuk dalam pengaruh kekuasaan Palembang, seperti Bangka, Belitung, sebagian Jambi (Muara Tembesi), Bengkulu (Kepahiang/Rejang), dan Lampung (Tulang Bawang/Mesuji) (Syawaluddin, 2014).

Wilayah kekuasaan Kesultanan Palembang terdiri dari wilayah *iliran* (ibukota) dan *uluan* (pedalaman). Di ibukota pemerintahan langsung di bawah sultan, pelakasana tugas harian dilakukan oleh putra mahkota (Pangeran Ratu) dan struktur di bawahnya terdapat empat mancanegara. Sistem seperti ini disebut *pancalang lima*/untuk wilayah uluan, terdapat tiga wilayah utama yaitu sikap, kepungutan, dan sindang (Rahim, 2998: 66). Adapun penduduknya terdiri dari pribumi dan asing. Penduduk pribumi, jika dilihat berdasarkan catatan sejarah, berasal dari keturunan Jawa. Menurut Supriyanto (2013), sebagian orang Jawa atau keturunan Jawa yang datang ke Palembang pada abad ke-16 disebut sebagai penduduk pribumi. Golongan ini kemudian menyebut dirinya sebagai wong Palembang asli karena memiliki garis



keturunan dari sultan Kesultanan Palembang yang biasanya memiliki gelar raden, mas agus, kiagus, kemas, dan nyimas.

Adapun penduduk asing terdiri dari orang Arab, Cina, dan Eropa. Orang Arab tinggal secara mengelompok di daerah tertentu dengan membentuk komunitas sesuai klannya. Mayoritas Arab di Palembang adalah keturunan Ba'Alawi yang dianggap keturunan Nabi Muhammad cucunya Husein. Oleh karena mereka terdiri dari para Sayid, maka mereka memiliki martabat tersendiri (Santun, Murni, & Supriyanto, 2010). Orang Cina ditempatkan di rumah rakit (Van Sevenhoven, 1971).

Beberapa sultan yang memegang peran penting terhadap perkembangan Kesultanan Palembang di antaranya Sultan Mahmud Badaruddin I, Sultan Mahmud Bahauddin, Sultan Mahmud Badaruddin II, dan lainnya. Dalam mengatur kehidupan bermasyarakat Kesultanan Palembang memedomani Undang-undang Simbur Cahaya karya Ratu Sinuhun istri dari Pangeran Sido Ing Kenayan. Undang-undang ini berisi aturan kehidupan bermasyarakat di Kesultanan Palembang. Bab 1 tentang adat bujang gadis dan perkawinan; Bab 2 tentang aturan marga; Bab 3 tentang aturan dusun dan berladang; Bab 4 tentang aturan kaum; Bab 5 tentang adat perhukuman; dan Bab 6 tentang aturan uang denda (Wulandari & Marzuki, 2020).

Roda kian berputar. Begitu pula Kesultanan Palembang, pada tahun 1825 berada di titik terendah. Konflik internal di istana dan campur tangan kolonial membuat pemerintahan Islam ini tak mampu menahan laju angin. Dalam rangka mempertahankan diri dari serangan kolonial, Kesultanan Palembang membangun benteng. Beberapa benteng yang dibangun Kesultanan Palembang untuk mempertahankan diri dari serangan kolonial di antaranya benteng Pulau Kemaro, benteng Pulau Salanama, benteng Pulau Keramat, benteng Sungsang, dan



keraton yang dipertahankan oleh tembok-tembok yang sangat tebal, benteng Plaju, benteng di tengah cerucuk yang menutupi Sungai Musi dari Pulau kemaro sampai Plaju (Farida et al., 2019). Secara *de jure*, Kesultanan Palembang dihapuskan oleh Pemerintah Kolonial Belanda pada tahun 1825.

KESIMPULAN

Kesultanan Palembang merupakan pemerintahan yang bercorak Islam di Palembang. Pemerintahan ini secara resmi berdiri pada tahun 1675 setelah Pangeran Ratu Ki Mas Hindi menggunakan gelar sultan pada namanya (Sultan Abdurrahman Kholifatul Mukminin Sayidul Imam). Sebelum secara resmi menjadi pemerintahan yang memiliki otoritas sendiri, Palembang memiliki hubungan dengan kerajaan-kerajaan di Jawa (Majapahit, Demak, Pajang, dan Mataram). Palembang merupakan wilayah protektorat kerajaan tersebut dan sebagai bentuk loyalitasnya Palembang secara rutin melakukan *seba*. Namun, pada saat di bawah Kerajaan Mataram, upeti yang dikirim dari Palembang ditolak oleh raja Mataram. Sikap inilah yang menjadi latar belakang Pangeran Ratu Ki Mas Hindi memproklamasikan Kesultanan Palembang. Pemerintahan Kesultanan Palembang diselenggarakan dengan sistem tradisional, yakni raja merupakan pimpinan tertinggi. Pada tahun 1825, Kesultanan Palembang secara *de jure* dihapuskan oleh Pemerintah Kolonial Belanda.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, T. (1982). *Agama, etos kerja dan perkembangan ekonomi*.

Farida, I., Rochmiatun, E., & Kalsum, N. U. (2019). Peran Sungai Musi dalam Perkembangan Peradaban Islam di Palembang: Dari Masa Kesultanan sampai Hindia-Belanda. *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, 3(1), 50–57.



- Hanafiah, D. (1998). Sejarah Perkembangan Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang. *Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang*.
- Hanafiah, D. (2005). *Sejarah Keraton-Keraton Palembang: Kuto Gawang*. Palembang: Pemkot Palembang.
- Haryono, T. (1997). Kerajaan Majapahit: Masa Sri Rajasanagara Sampai Girindrawarddhana. *Humaniora*, (5).
- Irwanto, D., & Alian, S. (2014). *Metodologi dan historiografi sejarah*. Eja_Publisher, Yogyakarta.
- Poesponegoro, M. D., & Notosusanto, N. (1975). *Sejarah nasional Indonesia: Jaman pertumbuhan dan perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia* (Vol. 3). Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Rahiem, H. (1998). *Sistem otoritas dan administrasi Islam: studi tentang pejabat agama masa kesultanan dan kolonial di Palembang*. Logos.
- Rochmiatun, E. (2017). Bukti-Bukti Proses Islamisasi Di Kesultanan Palembang. *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan Dan Sastra Islam*, 17(1), 1–17.
- Santun, D. I. M., Murni, M., & Supriyanto, S. (2010). *Iliran dan Uluan: dikotomi dan dinamika dalam sejarah kultural Palembang* (Vol. 1). Eja Publisher Yogyakarta.
- Supriyanto. (2013). *Pelayaran dan Perdagangan di Pelabuhan Palembang 1824-1864*. Yogyakarta: Ombak.
- Suswandari, S., Absor, N. F., Aprilia, D., Nurahman, L., & Noviansyah, A. (2021). Pemanfaatan Situs Sejarah Buddhisme di Palembang sebagai Suplemen Materi Pembelajaran Sejarah. *Estoria: Journal of Social Science and Humanities*, 1(2), 71–93.
<https://doi.org/10.30998/je.v1i2.599>
- Suswandari, S., Absor, N. F., Tamimah, S., Nugroho, Y. F., & Rahman, H. (2021). MENELISIK SEJARAH PEREKONOMIAN KERAJAAN SRIWIJAYA ABAD VII-XIII. *Sejarah Dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, Dan Pengajarannya*, 15(1), 91–97.



- Syarifuddin, K. H. A., & Zainuddin, H. (2013). *101 ulama Sumsel: riwayat hidup & perjuangannya*. Forum Pondok Pesantren Sumatera Selatan bekerja sama dengan Ar-Ruzz Media
- Syawaluddin, M. (2014). Analisis sosiologis terhadap sistem pergantian sultan di Kesultanan Palembang Darussalam. *Intizar*, 20(1), 139–162.
- Syawaludin, M., & SIRAJUDIN FIKRI, M. (2019). *Tradisi Politik Melayu; Analisis Pengangkatan dan Pergantian Kekuasaan di Kesultanan Palembang*. Rafah Press dan LP2M UIN Raden Fatah.
- Van Sevenhoven, J. L. (1971). *Lukisan tentang ibukota Palembang* (Vol. 5). Bhratara.
- Wolters, O. W. (1970). *The fall of Srivijaya in Malay history*.
- Wulandari, D. A., & Marzuki, M. (2020). Undang-Undang Simbur Cahaya dalam Mengatur Hukum Perkawinan di Kesultanan Palembang. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 22(2), 187–197.